

Analisis Karakteristik Anak Tidak Bersekolah di Indonesia *Characteristics Analysis of Out of School Children in Indonesia*

Mohamad Fahmi^{a,*}, Demy Marizka^a

^aDepartemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran

Abstract

This research identified and analyzed school participation of children in Indonesia from 7 to 15 years old. Using data collected by Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) in 2012, probit model estimates that there are more probabilities in boys rather than girls to leave their education. As well as living environment supported, citizen have more well educated children than villagers. Elementary schools had been highly needed to fulfil school supply so that out-of-school-children level will drop as low as possible. But an increase in junior high school supplied will not turned out as it applied on elementary schools.

Keywords: Economics of Education, Out of School Children, Basic Education, SUSENAS, Probit Model

Abstrak

Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik partisipasi sekolah anak-anak di Indonesia pada jenjang usia 7 sampai 15 tahun. Dengan menggunakan data *Survei Sosial Ekonomi Nasional* (SUSENAS) tahun 2012, hasil estimasi model *probit* menunjukkan bahwa anak laki-laki di Indonesia memiliki peluang lebih besar menjadi *out-of-school children* (oosc). Begitu pula dengan peluang anak-anak yang tinggal di pedesaan, yang lebih besar menjadi oosc dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan. Ketersediaan sekolah sangat diperlukan pada tingkat sekolah dasar untuk mengurangi oosc. Namun, pada tingkat sekolah menengah pertama penambahan jumlah sekolah tampaknya bukanlah pilihan tepat.

Kata kunci: Ekonomi Pendidikan, *Out of School Children*, Pendidikan Dasar, SUSENAS, Model *Probit*

JEL classifications: I240, O150

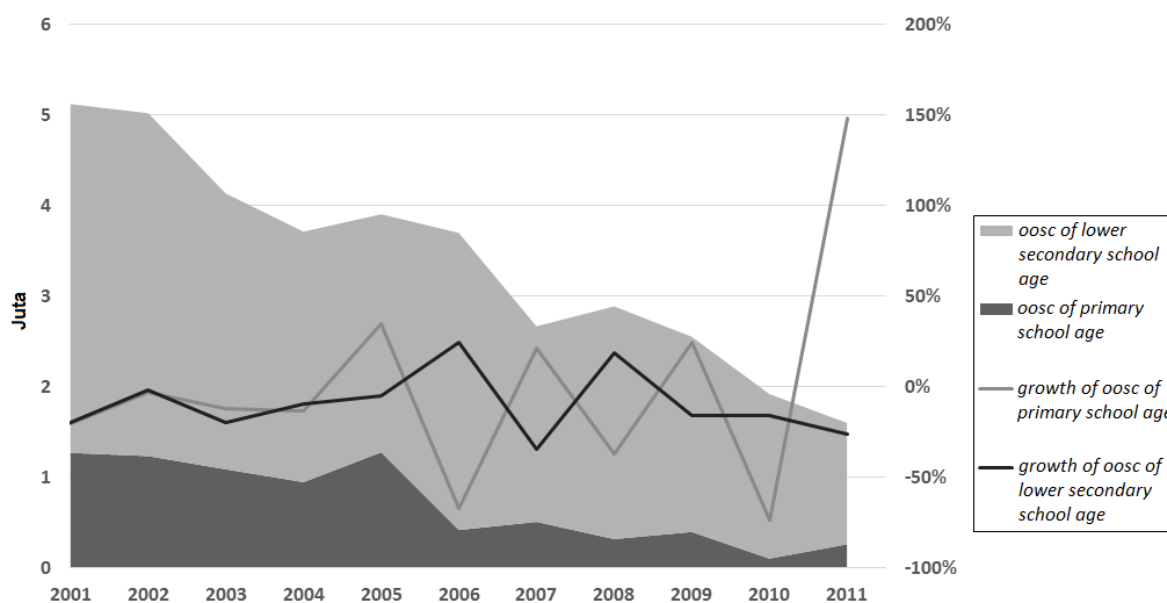
Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan yang ingin dicapai *Education for All* (EFA) dan *Millennium Development Goals* (MDGs) adalah memastikan bahwa di tahun 2015, semua anak-anak memperoleh akses gratis dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas. Pemerintah Indonesia pun telah meratifikasi konvensi hak anak yang menyebutkan dan mengakui bahwa anak-anak berhak memperoleh pendi-

dikan yang layak dan tidak terlibat aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, hingga saat ini keinginan dan janji pemerintah untuk segera membebaskan anak-anak usia sekolah dari kemungkinan putus sekolah belum juga terwujud.

Di Indonesia tercatat bahwa 3,5 juta anak usia 7–15 tahun tidak bersekolah di tahun 2010, dan 21% dari anak yang tidak bersekolah di usia ini berada di Jawa Barat (UNICEF Indonesia, 2012). Gambar 1 menunjukkan jumlah *out-of-school children* (oosc), yaitu anak-anak usia sekolah yang tidak atau belum bersekolah di Indonesia selama 10 tahun terakhir cenderung menurun, namun dibandingkan pada ta-

*Alamat Korespondensi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran. Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jawa Barat. *E-mail:* mfahmi@fe.unpad.ac.id.

Gambar 1: Jumlah dan Persentase Perubahan OOSC di Indonesia Tahun 2001–2011

Sumber: World Bank

hun 2010, pada tahun 2011 terjadi peningkatan oosc yang signifikan, yaitu sebesar 1,5 kali.

Menurut Suyanto *et al.* (2012), anak-anak di luar sekolah dan putus sekolah di berbagai daerah di Indonesia terus bermunculan yang disebabkan oleh berbagai alasan. Penyebab terbesar dari tingginya jumlah oosc tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai wilayah di dunia adalah kemiskinan. Akibat tekanan kemiskinan, rendahnya partisipasi orang tua terhadap pendidikan anaknya, dan faktor lainnya, banyak anak menjadi sumber pendapatan keluarga (Suyanto *et al.*, 2012). Dalam Kompas (2009), disebutkan bahwa setiap menit ada empat anak Indonesia yang harus putus sekolah.

Salah satu program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah melalui Program SD-SMP Satu Atap (*Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP)*) yang dimulai sejak April 2006. Program ini merupakan pengembangan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah

(MTs) reguler yang lokasinya dibuat menyatu atau berdekatan dengan lokasi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta pendukungnya untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil, terisolasi, dan terpencar.

Namun demikian, program-program yang telah dilaksanakan dan disediakan oleh pemerintah ternyata belum dapat menghapus tingkat oosc di Indonesia. Prediksi UNESCO target yang telah ditetapkan EFA tidak akan tercapai di tahun 2015 (Kompas, 2011).

Tinjauan Referensi

Salah satu indikator utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan (Suyanto *et al.*, 2012). Pendidikan ada karena memberikan kenaikan utilitas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang (Johnes, 1993). Pendidikan dapat dilihat dari sisi investasi modal manusia (*human capital*), karena pendidikan memberikan tingkat pengembalian pendapat seseorang di masa de-

pan (Becker, 1962; Mincer, 1958).

Keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak atau tidak, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut memengaruhi pilihan utilitas yang diharapkan (Kabubo-Mariara dan Mwabu, 2007). Dalam studi ini, faktor-faktor tersebut dilihat melalui karakteristik individu, keluarga, lingkungan, dan infrastruktur.

Dalam karakteristik individu, usia merupakan salah satu faktor penting karena usia mencerminkan biaya peluang absolut dari pendidikan (Kabubo-Mariara dan Mwabu, 2007). Ketika usia anak bertambah, peluang anak tersebut untuk meninggalkan sekolah lebih kuat seiring dengan peningkatan biaya peluang untuk membantu orang tua di rumah atau bekerja (Colclough *et al.*, 2000).

Selain itu, jenis kelamin seorang anak juga merupakan faktor penting kecenderungan orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Pada budaya di mana anak laki-laki merupakan pewaris keluarga, maka orang tua akan lebih cenderung berinvestasi pada anak laki-lakinya (Huisman dan Smits, 2009b). Pada budaya di mana anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suaminya, maka orang tua akan menyekolahkan anak laki-lakinya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, karena investasi pendidikan pada anak perempuan akan menjadi keuntungan bagi keluarga suaminya kelak dan bukan keluarganya sendiri (Colclough *et al.*, 2000). Namun terdapat studi, seperti studi yang dilakukan Levine dan Kevane (2003), menemukan bahwa di Indonesia investasi pendidikan pada anak perempuan tidak terpengaruh walaupun anak perempuan tersebut akan jauh dari orang tua setelah pernikahan.

Salah satu karakteristik keluarga dapat dilihat dari pendidikan orang tua. Beberapa studi membuktikan bahwa anak-anak dari orang tua dengan pendidikan yang baik meningkatkan peluang anak tersebut untuk bersekolah dan menyelesaikan sekolahnya (Case dan De-

aton, 1999; Buchmann dan Brakewood, 2000; Colclough *et al.*, 2000; Tansel, 2002; Ersado, 2005; Smits, 2007; Huisman dan Smits, 2009a). Orang tua yang mencapai tingkat pendidikan tertentu memiliki keinginan agar anak-anaknya mencapai setidaknya tingkat pendidikan yang sama dengan orang tuanya (Breen dan Goldthorpe, 1997).

Selain pendidikan orang tua, jumlah anak, dan urutan kelahiran anak dalam keluarga dapat memengaruhi distribusi sumber daya yang tersedia untuk pendidikan di antara anak-anak tersebut (Huisman dan Smits, 2009b). Baik di negara maju seperti di Amerika Serikat (Blake, 1989) maupun di negara berkembang seperti di Malaysia (Pong, 1997) dan di Thailand (Knodel *et al.*, 1990), banyaknya saudara kandung dapat menurunkan tingkat partisipasi sekolah anak. Hal ini dapat dikarenakan waktu dan sumber daya untuk setiap anak akan berkurang ketika jumlah anak yang dimiliki lebih banyak (Downey, 1995).

Di negara-negara berkembang, ditemukan bahwa anak yang lebih muda dalam keluarga memiliki peluang lebih besar untuk bersekolah (Buchmann dan Hannum, 2001; Smits, 2007; Huisman dan Smits, 2009a; 2009b). Hal ini dikarenakan anak yang lebih tua dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjaga adik-adik yang lebih muda atau berkontribusi terhadap pendapatan keluarga (Knodel *et al.*, 1990; Ersado, 2005; Smits, 2007; Huisman dan Smits, 2009a; 2009b).

Faktor karakteristik keluarga lainnya adalah tingkat kesejahteraan keluarga. Bagi keluarga yang berpendapatan lebih tinggi, biaya langsung yang berkaitan dengan pendidikan seperti uang sekolah, buku, dan seragam bukanlah sebuah hambatan (Huisman dan Smits, 2009b). Selain itu, bagi keluarga berpendapatan tinggi, biaya peluang dari anak tidak dapat membantu di rumah, atau membantu usaha keluarga, atau bekerja untuk memberikan tambahan pendapatan keluarga menjadi tidak penting (Basu,

1999). Dengan demikian, keluarga dengan pendapatan atau pengeluaran yang lebih tinggi berasosiasi dengan semakin tingginya peluang seorang anak bersekolah (Dar *et al.*, 2002; Tansel, 2002; Glewwe dan Jacoby, 2004; de Carvalho Filho, 2012). Pengeluaran per kapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan keluarga dapat digunakan untuk melihat kecenderungan anak bersekolah, seperti dalam studi Canagarajah dan Coulombe (1997).

Karakteristik lingkungan memengaruhi akses untuk memperoleh pendidikan. Di banyak negara, pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan merupakan faktor penting dalam menjelaskan perbedaan pendidikan yang diperoleh anak (Birdsall *et al.*, 2005). Menurut Birdsall *et al.* (2005), keluarga yang tinggal di daerah pedesaan cenderung merupakan keluarga miskin, dengan anggota keluarga yang kurang berpendidikan dan tekanan pada anak untuk bekerja membantu keluarga lebih besar, serta akses menuju sekolah yang lebih sulit dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan anak yang tinggal di daerah pedesaan memiliki tingkat *drop out* yang tinggi dan banyak yang terlambat memperoleh pendidikan (bersekolah).

Karakteristik lingkungan lainnya adalah anak yang tinggal di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah modern yang terkena dampak globalisasi, dengan jalan, infrastruktur transportasi, dan fasilitas umum lain yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di luar Pulau Jawa. Di daerah yang lebih modern, orang tua memiliki akses yang lebih mudah untuk menyekolahkan anaknya dan orang tua lebih mengerti mengenai arti penting pendidikan (Huisman dan Smits, 2009b).

Karakteristik infrastruktur yang dilihat dari rasio jumlah anak usia sekolah terhadap jumlah sekolah di masing-masing provinsi menunjukkan ketersediaan fasilitas sekolah. Ketika ada sekolah atau guru maka anak-anak dapat bersekolah, karena itu jumlah fasilitas sekolah

yang tersedia merupakan salah satu faktor penting selain kualitas sekolah, yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi bersekolah (Huisman dan Smits, 2009b).

Salah satu studi mengenai oosc di Indonesia dilakukan oleh Suyanto *et al.* (2012). Studi tersebut merupakan gabungan antara kegiatan pengamatan lapangan, *review* hasil studi dan analisis data sekunder tentang permasalahan anak di luar sekolah, siswa putus sekolah, dan siswa rawan putus sekolah di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, dan Situbondo. Dari hasil wawancara 150 responden anak putus sekolah di wilayah tersebut, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi anak tidak sekolah adalah kemiskinan, pekerja anak, fasilitas penunjang pendidikan yang tidak memadai, orang tua belum mengerti tentang arti penting pendidikan, dan pernikahan dini.

Berdasarkan data *Demographic and Health Survey (DHS) 2002/2003*, UNESCO (2005) mencatat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peluang terjadinya oosc di Indonesia meningkat secara signifikan adalah seorang ibu atau kepala rumah tangga tanpa pendidikan formal (pendidikan orang tua), banyaknya jumlah anak dalam keluarga, anak-anak dari keluarga miskin, dan anak-anak yatim piatu. Selain itu, usia dan jenis kelamin pun memengaruhi jumlah oosc di Indonesia walaupun tidak signifikan, yaitu anak umur 7 atau 12 tahun cenderung oosc. Berbeda dengan beberapa negara di dunia, di Indonesia laki-laki usia sekolah cenderung oosc dibandingkan dengan perempuan.

Di wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, kemiskinan dan pendidikan ibu yang rendah merupakan penyebab utama anak-anak cenderung oosc. Anak laki-laki di Filipina 7 kali lebih berisiko oosc dibandingkan anak perempuan (Albert *et al.*, 2012). Sedangkan di wilayah Asia lainnya seperti di Cina, Connelly dan Zheng (2003) dengan model *logit* dan *fixed-effects logit* menganalisis tingkat partisipasi se-

kolah dan tingkat kelulusan anak usia 10–18 tahun di Cina menggunakan data *Chinese Census 1990*. Studi tersebut menemukan bahwa tingkat partisipasi dan kelulusan sekolah berhubungan kuat dengan lokasi tempat tinggal dan gender, terutama anak laki-laki yang tinggal di perkotaan. Pengaruh konsisten terhadap masalah partisipasi dan kelulusan sekolah juga ditemukan pada pendidikan orang tua, keberadaan saudara kandung, tingkat pendapatan daerah, dan tingkat *village in-school*.

Di Turki, Tansel (2002) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah anak laki-laki dan perempuan melalui faktor individu dan keluarga seperti pendapatan rumah tangga, pendidikan, dan pekerjaan orang tua, serta faktor komunitas. Dengan menggunakan *ordered probit*, Tansel menemukan bahwa semakin tinggi pendapatan keluarga, maka semakin tinggi tingkat partisipasi sekolah terutama bagi anak laki-laki. Selain itu, lamanya pendidikan orang tua berhubungan kuat terhadap partisipasi sekolah terutama bagi anak perempuan, dan usaha keluarga menjadi alternatif dari bersekolah bagi anak laki-laki. Berdasarkan faktor komunitas, Tansel menemukan bahwa lokasi perkotaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi sekolah yang lebih tinggi.

Negara-negara di Afrika, seperti studi yang dilakukan oleh Kabubo-Mariara dan Mwabu (2007), dengan menggunakan data *Kenyan Household Survey* dan model *probit* menemukan bahwa faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi sekolah dasar di Kenya adalah karakteristik usia dan gender anak, pendidikan orang tua, pekerjaan ibu, komposisi keluarga, dan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan studi tersebut, peluang tingkat partisipasi sekolah meningkat di saat tingkat umur anak berkurang. Selain itu pendidikan ayah lebih penting dalam memengaruhi tingkat partisipasi sekolah dasar dibandingkan pendidikan ibu. Faktor penting lainnya adalah jarak dari rumah ke sumber air minum dan jarak ke sekolah,

kemampuan kognitif yang dihitung dari nilai ujian, dan tingkat keahlian pengajar (Kabubo-Mariara dan Mwabu, 2007).

Metode

Pada studi ini, penulis menggunakan data sekunder *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SU-SENAS) 2012*, dengan jumlah sampel sebanyak 43.889 anak usia 7 sampai 15 tahun, yang terdiri dari 30.793 anak usia SD (7–12 tahun) dan 13.096 anak usia SMP (13–15 tahun) di Indonesia. Salah satu cara melihat faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya oosc di Indonesia dapat diestimasi menggunakan model regresi *probit*. Model regresi *probit* merupakan salah satu model *cumulative distribution function* (CDF), untuk menganalisis hubungan antara 1 variabel terikat dengan beberapa variabel bebas, yang variabel terikatnya memiliki nilai biner yaitu, $y = 1$ jika suatu kejadian sukses dan $y = 0$ jika suatu kejadian gagal.

Model *probit* yang digunakan untuk mengestimasi peluang anak-anak di Indonesia yang merupakan oosc adalah sebagai berikut:

$$P(oosc_i = 1|X_i) = \Phi(\text{age, age squared, male, father education, mother education, siblings, first child, expenditure per capita, rural, Jawa, school supply}) \quad (1)$$

$$P(oosc_j = 1|X_j) = \Phi(\text{age, age squared, male, father education, mother education, siblings, first child, expenditure per capita, rural, Jawa, school supply}) \quad (2)$$

$$P(oosc_k = 1|X_k) = \Phi(\text{age, age squared, male, father education, mother education, siblings, first child, expenditure per capita, rural, Jawa, school supply}) \quad (3)$$

Indeks i , j , dan k , menunjukkan sampel yang digunakan. Indeks i untuk sampel anak usia 7–15 tahun, indeks j untuk sampel anak usia 7–12 tahun, dan indeks k untuk sampel anak usia 13–15 tahun. Variabel terikat *oosc* merupakan variabel yang menunjukkan status partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun. Variabel *dummy* ini bernilai sama dengan 1 jika responden tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak bersekolah lagi, dan bernilai sama dengan 0 jika responden masih bersekolah.

Variabel bebas terdiri dari umur, umur kuadrat, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), lamanya pendidikan ayah dan ibu, jumlah saudara kandung yang masih bersekolah dan masih balita, status anak sulung dalam keluarga, pengeluaran per kapita keluarga, daerah tempat tinggal di pedesaan dan Pulau Jawa, serta ketersediaan sekolah (negeri, swasta, MI, dan MTs) yang dihitung dari rasio jumlah anak usia sekolah terhadap jumlah sekolah di setiap provinsi.

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap probabilitas perilaku *oosc*, maka dilakukan uji signifikansi parsial menggunakan uji Z-statistik. Hipotesis *null* dari uji ini adalah tidak adanya pengaruh signifikan variabel bebas ke- i terhadap variabel terikat, dengan kriteria penolakan hipotesis *null* jika probabilitas Z-hitung (p -value) lebih kecil dari α tertentu (tingkat signifikansi 1%, 5%, 10%). Artinya, pada tingkat signifikansi α , variabel bebas ke- i berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas perilaku *oosc*.

Kemampuan variasi variabel bebas dalam menjelaskan variasi probabilitas perilaku *oosc*

dapat diuji menggunakan koefisien determinasi (R^2) sebagai pengukur *goodness of fit*. Karena model regresi *probit* menggunakan *dummy dependent variable*, maka untuk R^2 biasa itu tidak dapat digunakan, sebagai penggantinya digunakan *Pseudo- R^2* (Winkelmann dan Boes, 2006). Nilai *Pseudo- R^2* berkisar antara 0 dan 1 ($0 < \text{Pseudo-}R^2 < 1$) merupakan interpretasi tiruan dari R^2 *Ordinary Least Square* (OLS). Model *goodness of fit* dapat dilihat pula menggunakan *perfect correctly predicted* atau *Count- R^2* .

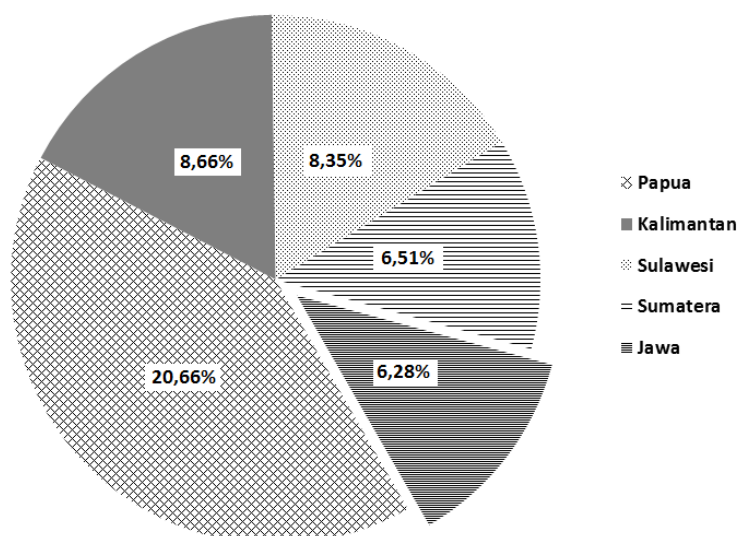
Setelah dilakukan pengujian pada model dan diketahui nilai masing-masing koefisien variabel bebas, digunakan efek marginal untuk menginterpretasikan nilai perubahan peluang atas masing-masing variabel bebas.

Hasil dan Analisis

Hasil pengolahan data SUSENAS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 2,7 juta anak usia 7 hingga 15 tahun di Indonesia merupakan *oosc*, dengan jumlah *oosc* laki-laki di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan *oosc* perempuan. Berdasarkan jenjang usia sekolah, jumlah *oosc* pada jenjang anak usia SMP lebih besar dibandingkan pada jenjang anak usia SD, yaitu sebesar 78,7%. Pada jenjang anak usia SD, jumlah *oosc* adalah sebanyak 576.632 anak dan 59,6%-nya merupakan anak laki-laki, sedangkan pada jenjang anak usia SMP, jumlah *oosc*-nya meningkat secara signifikan dengan total 2.129.720 anak dan 60,8%-nya merupakan anak laki-laki.

Penyebaran *oosc* di Indonesia pada tahun 2012 terlihat pada Gambar 2. Semakin gelap warna wilayah pada peta menunjukkan jumlah *oosc* yang lebih banyak.

Provinsi Papua merupakan wilayah dengan jumlah *oosc* terbanyak, yaitu 18,4% dari jumlah *oosc* di Indonesia atau sekitar 1,57% dari jumlah anak usia pendidikan dasar di Indonesia. Jumlah *oosc* terendah berada di Provinsi Yogyakarta, yaitu sebesar 0,15% dari jumlah

Gambar 3: Persentase OOSC Tahun 2012 Berdasarkan 5 Pulau Besar di Indonesia

Sumber: SUSENAS, Hasil Pengolahan STATA 12

mur 14 tahun; dan (ii) anak laki-laki di Indonesia berpeluang signifikan menjadi oosc dibandingkan anak perempuan, yaitu rata-rata sebesar 2,62% untuk usia 7–15 tahun, 0,78% untuk usia anak SD, dan 7,14% untuk usia anak usia SMP.

Kedua, Karakteristik Keluarga, yaitu (i) bertambahnya 1 tahun pendidikan ibu dapat mengurangi peluang oosc usia 7–15 tahun rata-rata sebesar 0,99%, usia SD sebesar 0,57%, dan usia SMP sebesar 1,97%. Begitu pula dengan setiap penambahan 1 tahun pendidikan ayah dapat mengurangi peluang oosc usia 7–15 tahun rata-rata sebesar 0,62%, usia SD sebesar 0,28%, dan usia SMP sebesar 1,45%; (ii) banyaknya jumlah saudara kandung yang bersekolah dan balita dalam keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat oosc di Indonesia. Bertambahnya 1 orang saudara kandung yang bersekolah dan balita dalam keluarga dapat menambah peluang oosc usia 7–15 tahun dan usia SD secara signifikan masing-masing sebesar 0,99% dan 0,22%. Begitu pula pada usia SMP, yaitu setiap penambahan 1 orang saudara kandung yang bersekolah dan balita dalam

keluarga dapat menambah peluang anak tersebut menjadi oosc sebesar 2,79%; (iii) anak sulung dalam keluarga memiliki peluang lebih besar menjadi oosc sebesar 0,44% pada usia 7–15 tahun, sedangkan apabila berdasarkan jenjang pendidikan anak sulung dalam keluarga tidak berpengaruh signifikan; dan (iv) ketika pengeluaran per kapita keluarga bertambah sebesar Rp1 juta, maka peluang tingkat oosc usia 7–15 tahun akan menurun secara signifikan rata-rata sebesar 1,87%. Begitu pula dengan peluang tingkat oosc usia SD dan usia SMP akan turun secara signifikan masing-masing sebesar 1,45% dan 3,6%.

Ketiga, Karakteristik Lingkungan, yaitu (i) dibandingkan dengan anak yang tinggal di perkotaan, anak usia SMP yang tinggal di pedesaan lebih berpeluang signifikan menjadi oosc rata-rata sebesar 3,68%. Begitu pula anak usia 7–15 tahun dan anak usia SD yang tinggal di pedesaan, yaitu lebih berpeluang signifikan menjadi oosc rata-rata sebesar 1,74% dan 0,76%; dan (ii) anak-anak yang tinggal di Pulau Jawa dengan fasilitas infrastruktur daerah yang lebih baik dibandingkan daerah di

luar Pulau Jawa, secara signifikan berpeluang tidak menjadi oosc rata-rata sebesar 3,23% untuk usia 7–15 tahun, 2,71% untuk usia SD, dan 2,89% untuk usia SMP.

Dan **Keempat, Karakteristik Infrastruktur**, yaitu ketersediaan sekolah yang dilihat dari rasio jumlah anak usia sekolah terhadap jumlah sekolah pun berpengaruh dalam menurunkan tingkat oosc di Indonesia. Ketika rasio jumlah anak usia sekolah terhadap jumlah sekolah naik 1 poin, maka tingkat oosc berpeluang turun secara signifikan rata-rata sebesar 0,01% untuk usia 7–15 tahun dan 0,02% untuk SD. Sedangkan untuk usia SMP, banyaknya sekolah yang tersedia tidak berpengaruh secara signifikan menurunkan tingkat oosc di Indonesia.

Simpulan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik oosc usia pendidikan dasar 7 hingga 15 tahun di Indonesia yang terdiri dari karakteristik individu, keluarga, lingkungan, dan infrastruktur, menggunakan data SUSENAS 2012. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 2,7 juta anak usia pendidikan dasar di Indonesia merupakan oosc dan 78,7%-nya merupakan oosc usia SMP, dengan persentase oosc laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, baik di jenjang SD maupun SMP.

Pada usia pendidikan dasar, 7–15 tahun, karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan orang tua, banyaknya saudara kandung dalam keluarga, status anak sulung, pengeluaran per kapita keluarga, daerah tempat tinggal pedesaan dan Pulau Jawa, serta ketersediaan sekolah, berpengaruh signifikan terhadap peluang seorang anak merupakan oosc. Pada jenjang usia sekolah dasar, hasil estimasi model *probit* menunjukkan bahwa peluang seorang anak menjadi oosc cenderung menurun hingga usia anak mulai mencapai 10 tahun atau kelas 4, di mana anak laki-laki berpeluang lebih besar

menjadi oosc dibandingkan anak perempuan. Faktor-faktor yang berpengaruh kuat mengurangi peluang seorang anak menjadi oosc adalah kesejahteraan keluarga dan karakteristik lingkungan yang berada di Jawa. Selain itu, lamanya pendidikan orang tua terutama pendidikan ibu, berpengaruh mengurangi peluang seorang anak menjadi oosc. Anak yang tinggal di pedesaan serta jumlah sekolah yang tidak memadai akan meningkatkan peluang anak tersebut menjadi oosc.

Seperti pada jenjang usia SD, pada jenjang usia SMP anak laki-laki berpeluang lebih besar menjadi oosc, dengan peningkatan peluang menjadi oosc ketika anak tersebut mencapai usia 14 tahun atau kelas 8. Faktor kesejahteraan keluarga dan karakteristik lingkungan yang berada di Jawa berpengaruh kuat mengurangi peluang seorang anak menjadi oosc. Begitu pula dengan lamanya pendidikan orang tua, terutama pendidikan ibu, yang berpengaruh dalam mengurangi peluang tersebut. Sedangkan faktor yang berpengaruh kuat dalam meningkatkan peluang seorang anak menjadi oosc adalah jumlah saudara kandung yang bersekolah dalam keluarga dan anak yang tinggal di daerah pedesaan. Berbeda dengan jenjang SD, pada jenjang SMP jumlah sekolah tidak berpengaruh terhadap peluang seorang anak menjadi oosc, yang menunjukkan bahwa jumlah sekolah sudah memadai pada jenjang SMP.

Hasil dari studi ini memberikan implikasi pada kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Faktor kesejahteraan keluarga yang dapat memberikan peluang besar seorang anak untuk tetap sekolah, sehingga bantuan keuangan atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) dari pemerintah sangat diperlukan bagi keluarga miskin, terutama bagi anak laki-laki, agar dapat tetap bersekolah. Seperti studi yang dilakukan oleh SMERU (2006) yang menunjukkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sukses meningkatkan motivasi anak dari keluarga miskin untuk bersekolah (Comola dan de Mello, 2010), karena jumlah oosc yang lebih banyak

pada tingkat sekolah menengah pertama, CCT pun dapat difokuskan pada anak usia SMP untuk meningkatkan partisipasi sekolah di jenjang ini (Filmer dan Schady, 2006; 2009; 2011; Barrera-Osorio dan Filmer, 2013). Banyaknya jumlah saudara kandung dalam keluarga yang memengaruhi peluang oosc pada jenjang SMP dapat ditanggulangi dengan mengaktifkan lagi gerakan Keluarga Berencana (KB) dengan program dua anak cukup.

Kesenjangan antara daerah pedesaan terutama di luar Pulau Jawa dengan daerah perkotaan dapat terlihat dari fasilitas infrastruktur serta akses dan ketersediaan sekolah (Bappenas *et al.*, 2010). Dengan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Pembangunan Kelas Baru dapat meningkatkan akses untuk memperoleh pendidikan (Bappenas *et al.*, 2010), Bantuan dana pembangunan dan perbaikan fasilitas yang telah diberikan oleh *World Bank* kepada dinas atau lembaga daerah pun memberikan hasil yang baik terutama dalam meningkatkan minat bersekolah (IEG, 2006).

Program SD-SMP Satu Atap dapat menjadi solusi yang efisien dan efektif dalam mengurangi tingkat oosc di pedesaan (Bappenas *et al.*, 2010). Dengan menyediakan asrama dan bus sekolah gratis bagi murid yang tinggal berjauhan dengan sekolah dapat menjadi pertimbangan pemerintah dan organisasi non-pemerintahan lain sebagai solusi untuk meningkatkan akses bersekolah (Bappenas *et al.*, 2010).

Daftar Pustaka

- [1] Albert, J. R. G., Quimba, F. M. A., Ramos, A. P. E., & Almeda, J. P. (2012). Profile of Out-of-School Children in the Philippines. *Philippine Institute for Development Studies (PIDS) Discussion Paper Series, 2012-01*. Philippines: The Research Information Staff, Philippine Institute for Development Studies.
- [2] Bappenas, UNICEF, & SMERU Research Institute. (2010). *Child Poverty and Disparities in Indonesia: Challenges for Inclusive Growth*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. http://www.unicef.org/indonesia/Child_Poverty_Indonesia.pdf (Accessed July 7, 2014).
- [3] Barrera-Osorio, F., & Filmer, D. (2013). Incentivizing Schooling for Learning: Evidence on the Impact of Alternative Targeting Approaches. *Policy Research Working Paper, 6541*. East Asia and Pacific Region, Human Development and Public Services Team & Education Team, Development Research Group, The World Bank. http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/07/23/000158349_20130723155137/Rendered/PDF/WPS6541.pdf (Accessed July 7, 2014).
- [4] Basu, K. (1999). Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standards. *Journal of Economics Literature*, 37 (3), 1083–1119.
- [5] Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. *Journal of Political Economy*, 70 (5) Part 2: Investment in Human Beings (Oct., 1962), 9–49.
- [6] Birdsall, N., Levine, R., & Ibrahim, A. (2005). Towards Universal Primary Education: Investment, Incentives, and Institution. *European Journal of Education*, 40 (3), 337–349.
- [7] Blake, J. (1989). *Family Size and Achievement*. Berkeley: University of California Press.
- [8] Breen, R., & Goldthorpe, J. H. (1997). Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory. *Rationality and Society*, 9 (3), 275–305.
- [9] Buchmann, C., & Brakewood, D. (2000). Labor Structure and School Enrollments in Developing Societies: Thailand and Kenya Compared. *Comparative Education Review*, 44 (2), 175–204.
- [10] Buchmann, C., & Hannum, E. (2001). Education and Stratification in Developing Countries: A Review of Theories and Research. *Annual Review of Sociology*, 27, 77–102.
- [11] Canagarajah, S., & Coulombe, H. (1997). Child Labor and Schooling in Ghana. *Policy Research Working Paper, 1844*. Washington, DC: The World Bank, Human Development Technical Family, Africa Region. http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/11/01/000009265_3980203115439/Rendered/PDF/multi_page.pdf (Accessed July 7, 2014).
- [12] Case, A., & Deaton, A. (1999). School Inputs and Educational Outcomes in South Africa. *The Quarterly Journal of Economics*, 114 (3), 1047–1084.
- [13] Colclough, C., Rose, P., & Tembon, M. (2000). Gender Inequalities in Primary Schooling: The Roles of Poverty and Adverse Cultural Practice. *International Journal of Educational Development*, 20 (1), 5–27.

- [14] Comola, M., & de Mello, L. (2010). Enhancing the Effectiveness of Social Policies in Indonesia. *OECD Economics Department Working Papers*, 810. Paris: OECD Publishing. <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5km5xvbm6bf8.pdf?expires=1424055559&id=id&accname=guest&checksum=A3A2B586D68D2436161F9BFAFC3B3C94> (Accessed July 7, 2014).
- [15] Connelly, R., & Zheng, Z. (2003). Determinants of School Enrollment and Completion of 10 to 18 Year Olds in China. *Economics of Education Review*, 22 (4), 379–388.
- [16] Dar, A., Blunch, N-H., Kim, B., & Sasaki, M. (2002). Participation of Children in Schooling and Labor Activities: A Review of Empirical Studies. *Social Protection Discussion Paper Series*, 0221. Washington, DC: Social Protection Unit, Human Development Network, The World Bank. <http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Child-Labor-DP/0221.pdf> (Accessed July 7, 2014).
- [17] de Carvalho Filho, I. E. (2012). Household Income as a Determinant of Child Labor and School Enrollment in Brazil: Evidence from a Social Security Reform. *Economic Development and Cultural Change*, 60 (2), 399–495.
- [18] Downey, D. B. (1995). When Bigger is Not Better: Family Size, Parental Resources, and Children's Educational Performance. *American Sociological Review*, 60 (5), 746–761.
- [19] Ersado, L. (2005). Child Labor and Schooling Decisions in Urban and Rural Areas: Comparative Evidence from Nepal, Peru, and Zimbabwe. *World Development*, 33 (3), 455–480.
- [20] Filmer, D., & Schady, N. (2006). Getting Girls into School: Evidence from a Scholarship Program in Cambodia. *Human Development Sector Reports*, 36727-KH. Washington, DV: Human Development Sector Reports. East Asia and the Pacific Region. The World Bank. http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099080014368/Getting_GirlsintoSchool_Cambodia.pdf (Accessed July 7, 2014).
- [21] Filmer, D., & Schady, N. (2009). School Enrollment, Selection and Test Scores. *Policy Research Working Paper*, 4998. *Impact Evaluation Series No. 34*. Washington, DV: Human Development and Public Services Team. Development Research Group. The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4190/WPS4998.pdf?sequence=1> (Accessed July 7, 2014).
- [22] Filmer, D., & Schady, N. (2011). Does More Cash in Conditional Cash Transfer Programs Always Lead to Larger Impacts on School Attendance? *Journal of Development Economics*, 96 (1), 150–157.
- [23] Glewwe, P., & Jacoby, H. G. (2004). Economic Growth and The Demand for Education: Is There a Wealth Effect? *Journal of Development Economics*, 74 (1), 33–51.
- [24] Huisman, J., & Smits, J. (2009a). Effects of Household- and District-Level Factors on Primary School Enrollment in 30 Developing Countries. *World Development*, 37 (1), 179–193.
- [25] Huisman, J., & Smits, J. (2009b). Keeping Children in School: Household and District-level Determinants of School Dropout in 363 Districts of 30 Developing Countries. *NiCE Working Paper*, 09-105. Netherlands: Nijmegen Center for Economics (NiCE). Institute for Management Research. Radboud University Nijmegen. http://www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09105.pdf (Accessed July 7, 2014).
- [26] IEG. (2006). *From Schooling Access to Learning Outcomes: An Unfinished Agenda: An Evaluation of World Bank Support to Primary Education*. Washington, DC: Independent Evaluation Group. The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7083/372650Schooling0Access01PUBLIC1.pdf?sequence=1> (Accessed July 7, 2014).
- [27] Johnes, G. (1993). *The Economics of Education*. London: The Macmillan Press.
- [28] Kabubo-Mariara, J., & Mwabu, D. K. (2007). Determinants of School Enrollment and Education Attainment: Empirical Evidence from Kenya. *South African Journal of Economics*, 75 (3), 572–593.
- [29] Knodel, J., Havanon, N., & Sittitrai, W. (1990). Family Size and the Education of Children in the Context of Rapid Fertility Decline. *Population and Development Review*, 16 (1), 31–62.
- [30] Kompas. (2009, Desember 17). *Waduh... Tiap Menit 4 Anak Putus Sekolah!* <http://health.kompas.com/read/2009/12/17/15494494/waduh.Tiap.Menit.4.Anak.Putus.Sekolah>. (Accessed July 7, 2014).
- [31] Kompas. (2011, Maret 2). *Suram, Pendidikan Untuk Semua.* <http://travel.kompas.com/read/2011/03/02/19062358/Suram.Pendidikan.Untuk.Semua> (Accessed July 7, 2014).
- [32] Levine, D., & Kevane, M. (2003). Are Investments in Daughters Lower when Daughters Move Away? Evidence from Indonesia. *World Development*, 31 (6), 1065–1084.
- [33] Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *Journal of Political Economy*, 66 (4), 281–302.
- [34] Pong, S-L. (1997). Sibship Size and Educational Attainment in Peninsular Malaysia: Do Policies Mat-

- ter? *Sociological Perspectives*, 40 (2), 227–242.
- [35] SMERU. (2006). A Rapid Appraisal of the PKPS-BBM Education Sector: School Operational Assistance (BOS) Program 2005. *SMERU Research Report, September 2006*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- [36] Smits, J. (2007). Family Background and Context Effects on Educational Participation in Five Arab Countries. *NiCE Working Paper, 07-106*. Netherlands: Nijmegen Center for Economics (NiCE). Institute for Management Research. Radboud University Nijmegen. http://www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_07106.pdf (Accessed July 7, 2014).
- [37] Suyanto, B., Ariadi, S., Sugihartati, R., & Mailiki, Z. (2012). *Anak Tidak Sekolah (Studi Kasus di Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, & Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur)*. Surabaya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur & UNICEF.
- [38] Tansel, A. (2002). Determinants of School Attainment of Boys and Girls in Turkey: Individual, Household and Community Factors. *Economics of Education Review*, 21 (5), 455–470.
- [39] UNESCO. (2005). *Children Out of School: Measuring Exclusion from Primary Education*. Canada: UNESCO Institute for Statistics. <http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/oosc05-en.pdf> (Accessed July 7, 2014).
- [40] UNICEF Indonesia. (2012). *Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini: Ringkasan Kajian*. Jakarta: UNICEF Indonesia. http://www.unicef.org/indonesia/id/A3_-_B_Ringkasan_Kajian_Pendidikan.pdf (Accessed July 7, 2014).
- [41] Winkelmann, R., & Boes, S. (2006). *Analysis of Microdata*. New York: Springer.

Tabel 1: Hasil Estimasi Model *Probit*

Variable	Primary & Secondary (Model 1)		Primary (Model 2)		Secondary (Model 3)	
	Coef.	dy/dx	Coef.	dy/dx	Coef.	dy/dx
<i>Child characteristics</i>						
<i>age</i>	-0,4477*** (0,0408)	-0,0540 (0,0050)	-1,7273*** (0,1254)	-0,1029 (0,0077)	-6,3711*** (0,8349)	-1,4683 (0,1915)
<i>age squared</i>	0,0271*** (0,0018)	0,0033 (0,0002)	0,0876*** (0,0066)	0,0052 (0,0004)	0,2203*** (0,0299)	0,0508 (0,0068)
<i>male</i>	0,2176*** (0,0201)	0,0262 (0,0024)	0,1315*** (0,0323)	0,0078 (0,0019)	0,3099*** (0,0279)	0,0714 (0,0063)
<i>Household characteristics</i>						
<i>father education</i>	-0,0513*** (0,0035)	-0,0062 (0,0004)	-0,0473*** (0,0058)	-0,0028 (0,0003)	-0,0628*** (0,0048)	-0,0145 (0,0011)
<i>mother education</i>	-0,0821*** (0,0039)	-0,0099 (0,0005)	-0,0958*** (0,0066)	-0,0057 (0,0004)	-0,0854*** (0,0052)	-0,0197 (0,0012)
<i>siblings</i>	0,0825*** (0,0077)	0,0099 (0,0009)	0,0364*** (0,0124)	0,0022 (0,0007)	0,1212*** (0,0106)	0,0279 (0,0024)
<i>first child</i>	0,0365* (0,0215)	0,0044 (0,0026)	0,0313 (0,0371)	0,0019 (0,0022)	0,0285 (0,0284)	0,0066 (0,0065)
<i>expenditure per capita</i>	-0,1551** (0,0653)	-0,0187 (0,0079)	-0,2442** (0,0978)	-0,0145 (0,0058)	-0,1560** (0,0776)	-0,0360 (0,0179)
<i>Community characteristics</i>						
<i>rural</i>	0,1444*** (0,0253)	0,0174 (0,0030)	0,1282** (0,0417)	0,0076 (0,0025)	0,1596*** (0,0335)	0,0368 (0,0077)
<i>Jawa</i>	-0,2681 (0,0343)	-0,0323 (0,0041)	-0,4546*** (0,0597)	-0,0271 (0,0035)	-0,1253** (0,0559)	-0,0289 (0,0129)
<i>Infrastructure characteristics</i>						
<i>school supply</i>	0,0010*** (0,0003)	0,0001 (0,0000)	0,0036*** (0,0005)	0,0002 (0,0000)	-0,0002 (0,0002)	-0,0001 (0,0000)
<i>constant</i>	0,3812 (0,2383)		6,4890*** (0,5867)		45,6730*** (5,8186)	
<i>Number of Observation</i>	43889		30793		13096	
<i>Pseudo R2</i>	0,2143		0,1918		0,1768	
<i>Count R2</i>	0,9192		0,9685		0,8174	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%

dy/dx adalah efek marginal

() adalah robust standard error